

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:7) adalah : “... proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan”.

Definisi Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) adalah :

“Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results there of”.

Sedangkan menurut Warren, Reeve dan Fees (2005:10) yang dialihbahasakan oleh Farahmitta dan Hendrawan menyatakan bahwa:

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan.”

2.1.1.2 Teori Akuntansi yang Digunakan

Signaling theory merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan (Suwardjono, 2005). *Signaling theory* berakar pada teori akuntansi pragmatic yang mengamati pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai yang memperhatikan pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi (Suwardjono, 2005). Menurut Ghazali dan Chariri (2007), teori pramagtik menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan, dimana teori ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologis dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporan. Pendekatan pragmatis dapat dilakukan dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan, dimana adanya reaksi pemakai laporan keuangan merupakan bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan berisi informasi yang relevan.

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan

Penjelasan mengenai akuntansi keuangan menurut Martani (2012:8) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari

akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).”

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure

2.1.2.1 Pengertian CSR

Sebelum membahas pengertian *Corporate Social Responsibility Disclosure*, penulis akan membahas pengertian *Corporate Social Responsibility* terlebih dahulu.

Lord Holmes dan Richard Watts (2006) dalam Hadi (2014:46) menyatakan bahwa:

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workers and their families as well as of the local community and society at large.”

Lawrence, Weber dan Post (2002) dalam Kartini (2013:3) menyatakan bahwa CSR: *... a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities and their environment.*

Menurut Weramasubun (2008:1):

“Istilah corporate responsibility mengacu pada tanggung jawab sector bisnis dalam kaitannya dengan semua pihak yang terlibat, mempengaruhi dan terkena dampak dari sebuah kegiatan bisnis. Meski tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan, sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.”

Sedangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 butir 3 menyatakan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Selain itu, ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi CSR sebagai:

“The responsibility of an organization for the impacts of its decision and activities on society and the environment, through transparency and ethical behavior that: (a) contribute to sustainable development, including health and welfare of society, (b) takes into account the expectation of stakeholders, (c) is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior, and (d) is integrated throughout the organization and practices in its relationship.”

2.1.2.2 Prinsip-prinsip CSR

Crowther (2008) dalam Hadi (2014:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sebagai berikut:

1. *Sustainability* berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya manusia di masa depan.
2. *Accountability* merupakan upaya perusahaan untuk bertanggungjawab atas aktivitas perusahaan yang telah dilakukan yang mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eskternal. Akuntabilitas perusahaan dapat dijadikan sabagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap pemangku kepentingan.
3. *Transparency* merupakan prinsip yang sangat penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan. Transparansi dapat mengurangi dampak asimetris informasi dan kesalahpahaman yang dapat membuat para pembuat keputusan salah dalam mengambil keputusan.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

- Akuntabilitas
- Transparansi

- Perilaku yang beretika
- Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
- Kepatuhan kepada hukum
- Menghormati norma-norma perilaku internasional
- Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

2.1.2.3 Tujuan Perusahaan Melaksanakan CSR

Menurut Williams (2001:123) dalam Resturiyani (2012) menyebutkan bahwa:

Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.

1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

Tujuan lain dikemukakan oleh Hadi (2014:156) adalah sebagai berikut:

- a. Aktualisasi tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan masyarakat.

- b. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.
- c. Implementasi perusahaan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- d. Tanggung jawab terhadap pemegang saham.
- e. Membangun *image* perusahaan.
- f. Komitmen perusahaan mengembangkan pembangunan berkelanjutan.

2.1.2.4 Manfaat CSR

Kartini (2013:83-88) menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam inisiatif CSR di era sekarang ini tidak akan sia-sia. Perusahaan akan mendapatkan *reward* berupa:

1. *Reward Financial*, yang terdiri dari:
 - a. Menurunkan biaya operasional perusahaan
 - b. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
 - c. Menarik calon investor
 - d. Pertumbuhan nilai saham yang signifikan
 - e. Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik
 - f. Mencegah risiko dari dampak sosial
 - g. Mencegah risiko dari dampak alam
2. *Reward Non-Financial*, hasil *reward* ini tidak berbentuk uang tetapi berbentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas perusahaan tersebut secara kualitatif, dan tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Inti *reward* dari melaksanakan CSR yang bersifat non finansial adalah “memperkuat reputasi perusahaan”.

Menurut Adam dan Zutshi (2004) dalam Astuti (2015), *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan banyak manfaat, yaitu:

1. Peningkatan profit bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik.
2. Menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar.
3. Mampu meningkatkan reputasi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari pembangunan citra perusahaan (*corporate image building*).

Selain itu, Susanto (2007) dalam Susiloadi (2008) mengemukakan 6 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari aktivitas CSR, yaitu:

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.
4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholders*.
5. Meningkatkan penjualan.
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya.

2.1.2.5 Komponen-komponen CSR

Menurut Carroll (1979) dalam Kartini (2013:14), konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Economic Responsibilities*
Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
2. *Legal Responsibilities*
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat secara menguntungkan.
3. *Ethical Responsibilities*
Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein (1989), etika bisnis menunjukkan moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai suatu isu dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan (utilitas) atau tidak.
4. *Discretionary Responsibilities*
Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat bermanfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh suatu perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis. Dalam kaitan ini, perusahaan juga ingin dipandang sebagai warga Negara yang baik (*good citizen*) dimana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai manifestasi *discretionary responsibilities* sering juga disebut *Corporate Citizenship*. Sedangkan aktivitas *corporate citizenship* yang bertujuan

untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat disebut sebagai *community development*.

Pada tabel 2.1, menunjukkan keempat kategori tanggung jawab sosial menurut Carrol disertai dengan contoh program/aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk setiap kategori tanggung jawab sosial berikut:

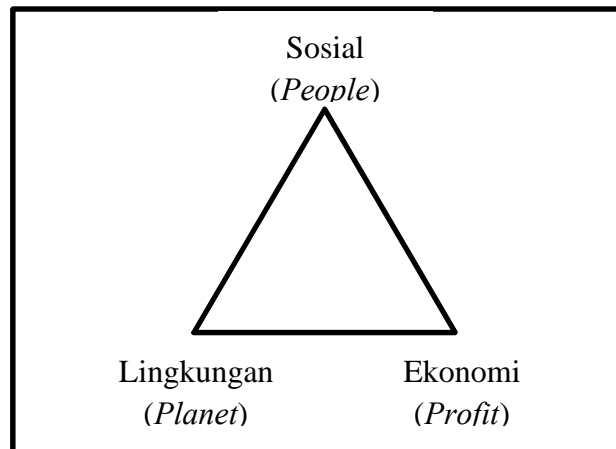
Tabel 2.1

Kategori Tanggung Jawab Sosial dan Aktivitas CSR

Kategori	Program/Aktivitas
<i>Economic Responsibilities</i>	<i>Corporate giving/charity, corporate citizenship, community development</i>
<i>Legal Responsibilities</i>	Memproduksi produk makanan yang bergizi dan aman bagi masyarakat
<i>Ethical Responsibilities</i>	Membayar pajak, menaati Undang-Undang ketenagakerjaan
<i>Discretionary Responsibilities</i>	Melaksanakan <i>good corporate governance</i> yang memungkinkan perusahaan memperoleh maksimalisasi laba

Sumber: Kartini (2013)

John Elkington (1997) dalam (Wibisono, 2007) melalui bukunya “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”, mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:



Gambar 2.1 Triple Bottom Line

Penjelasan tiga komponen tersebut menurut Wibisono (2007:33-37) adalah sebagai berikut:

1. *Profit* (keuntungan)
Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. *Profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.
2. *People* (masyarakat pemangku kepentingan)
 Menyadari bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
3. *Planet* (lingkungan)
 Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita

merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutam dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.

2.1.2.6 Pengertian CSR Disclosure

Dikutip dari penelitian Amelia (2013):

“Disclosure of corporate social responsibility which is often also referred to as social disclosure, corporate social reporting, social accounting (Mathews, 1995) or the corporate social responsibility (Hackston and Milne, 1996) is a process of communicating the social and environmental impact of economic activities of the organization with respect to specific groups of interested parties and to society as a whole.”

Crowther (2008:106) menyatakan pengertian *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai berikut:

“Corporate Social Disclosure can be defined as the provision of financial and non-financial information relating to an organization’s interaction with its physical and social environment, as stated in annual report or separate social reports. Corporate Social Disclosure includes details of the physical and social environment, energy, human resources, products and community involvement matters.”

Pengungkapan CSR merupakan pemberian informasi dan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap *stakeholder*. Hal ini juga merupakan salah satu cara mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi *stakeholder* (Kartini, 2013:56).

Ikhsan (2008:131) menyatakan bahwa pengungkapan (*disclosure*) dibagi menjadi pengungkapan wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*).

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bersifat wajib seperti yang tertera dalam pasal 74 dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Disebutkan juga kewajiban mengungkapkan kegiatan CSR perusahaan dalam *annual report* perusahaan di pasal 66 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Informasi yang bersifat sukarela adalah item-item CSR yang diungkapkan perusahaan; ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan baku yang mengaturnya.

2.1.2.7 Indeks CSR Disclosure

Dalam pembahasan tentang pengertian CSR Disclosure, disebutkan bahwa item-item CSR yang diungkapkan perusahaan bersifat sukarela dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan baku yang mengaturnya.

Terdapat banyak standar yang harus dijadikan pijakan dalam praktik pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*). *Equator Principles* yang diadopsi beberapa negara, merumuskan beberapa prinsip, antara lain (Wibisono, 2007):

1. *Accountability's (AA1000) standard*, yang mengacu pada prinsip “*Triple Bottom Line*” dari John Elkington.

Standar berbasis prinsip yang diakui untuk organisasi yang membantu untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar tersebut adalah kerangka kerja *open source* yang dikembangkan melalui konsultasi multi-pihak dan proses *review*. Standar ini dirancang agar kompatibel dengan standar kunci lain termasuk pedoman GRI, SA8000, seri ISO dan standar akuntansi keuangan.

2. *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmental Economies*

(CERES) dan UNEP pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI terdiri dari G3, G3.1 dan G4. G3 atau yang sering dikenal dengan G 3.0 merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator dan merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. G3.1 merupakan versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung 84 indikator termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumnya pada G3 dengan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih menyempurnakan pedoman GRI. G4 merupakan pedoman terbaru yang memiliki 91 indikator.

3. *Social Accountability International SA8000 Standard*

SA 8000 adalah standar yang fokus pada tenaga kerja dan kondisi tempat kerja. SA8000 didasarkan pada ISO 9000 teknik mengaudit, menentukan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk terus mendorong perbaikan dan berfokus pada system manajemen dan dokumentasi untuk membuktikan sistem ini. Sertifikasi SA8000 dilakukan secara independen, eksternal auditor dan berhubungan dengan kinerja perusahaan.

4. *ISO 14000 Environmental Management Standard*

ISO 14000 adalah standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada untuk membantu organisasi untuk meminimalkan dampak negatif operasi mereka terhadap lingkungan, memenuhi hukum, peraturan dan persyaratan berorientasi lingkungan dan semakin meningkatkannya.

5. ISO 26000

ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan bimbingan pada pelaporan keberlanjutan yang dibuat oleh *International Organization for Standardization* (ISO).

Sebagai acuan untuk melakukan penilaian CSR, penulis menggunakan indikator GRI G4. Indikator GRI G4 terdiri dari 3 kategori pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia.

Berikut adalah indikator-indikator pengungkapan CSR sebagaimana dikemukakan oleh GRI:

Tabel 2.2

Indikator-indikator CSR Disclosure menurut GRI

Indikator berdasarkan Aspek		
Kategori: EKONOMI		
Kinerja Ekonomi		
EC	1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC	2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC	3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC	4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan di Pasar		
EC	5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender

		dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC	6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
EC	7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC	8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan		
EC	9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
Kategori: LINGKUNGAN		
Bahan		
EN	1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN	2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi		
EN	3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN	4	Konsumsi energi di luar organisasi
EN	5	Intensitas energy
EN	6	Pengurangan konsumsi energy
EN	7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air		
EN	8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN	9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN	10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati		
EN	11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN	12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN	13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN	14	Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko

		kepunahan
Emisi		
EN	15	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) langsung
EN	16	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) energi tidak langsung
EN	17	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung lainnya
EN	18	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN	19	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN	20	Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO)
EN	21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah		
EN	22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN	23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN	24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN	25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN	26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa		
EN	27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN	28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan		
EN	29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi		
EN	30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain		
EN	31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
EN	32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN	33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
EN	34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori: SOSIAL		
PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian		
LA	1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> , dan wilayah
LA	2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA	3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>gender</i>
Hubungan Industrial		
LA	4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
LA	5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA	6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan <i>gender</i>
LA	7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA	8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan		
LA	9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
LA	10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA	11	Persentase karyawan yang menerima revaluasi kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
LA	12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki		

LA	13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan		
LA	14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA	15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
LA	16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
HAK ASASI MANUSIA		
Investasi		
HR	1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR	2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi		
HR	3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		
HR	4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak		
HR	5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja		
HR	6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan		
HR	7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi

Hak Adat		
HR	8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen		
HR	9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia		
HR	10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR	11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia		
HR	12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal		
SO	1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO	2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-korupsi		
SO	3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO	4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO	5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Politik		
SO	6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan		
SO	7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan		
SO	8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan
SO	9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO	10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

Asesmen Pemasok atas Dampak terhadap Masyarakat		
SO	11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
PR	1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR	2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa		
PR	3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR	4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR	5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran		
PR	6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR	7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan		
PR	8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan		
PR	9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: www.globalreporting.org

2.1.2.8 Pengukuran CSR Disclosure

Menurut Martínez dan Rodríguez (2013), tidak ada satu cara khusus untuk mengukur aktivitas CSR. Maignan dan Ferrel (2000) dalam Martínez dan

Rodríguez (2013) mengategorikan 3 pendekatan utama: (1) *expert assessments*, (2) *single or multiple indicators*, dan (3) *surveys of management*. Turker (2009) dalam Martínez dan Rodríguez (2013) mengembangkan klasifikasi yang telah dibuat oleh Maignan dan Ferrel (2000) menjadi: *reputation indices*, *databases*, *single and multiple indicators*, *content analysis of publications* dan *measurement frameworks at the individual and organizational levels*.

Reputation indices and *databases* adalah bagian dari metode yang digunakan untuk menilai aktivitas tanggung jawab sosial. *Single and multiple indicators* menggunakan indikator *one-dimensional* dan *multidimensional*. *Content analysis of publications* adalah metode dimana analisis dilakukan terhadap informasi laporan CSR perusahaan. *Measurement frameworks at the individual and organizational levels* ini berdasarkan penggunaan pengukuran yang mengukur persepsi kegiatan CSR oleh individu. Dimana metode-metode sebelumnya berusaha mengukur kinerja CSR yang sesungguhnya, metode ini mengukur persepsi yang *stakeholders* paham terhadap konsep CSR.

Content Analysis, atau Analisis Isi yang ditemukan oleh Harold D Lasswell digunakan untuk mengukur kualitatif dengan kuantitatif. Seperti yang kemukakan oleh Lasswell (1952) dalam Franzosi (2007): ... *By means of symbol analysis [content analysis] it is clear we are able to arrive at rather unambiguous descriptions of fundamental features of society.*

Menurut Abbot and Monsen (1979) dalam Vourvachis (2007):

“Content Analysis is most often viewed in CSR as “a technique for gathering data that consists of codifying qualitative information in anecdotal and literary form into categories in order to derive quantitative scales of varying levels of complexity.”

Di antara semua metode yang telah diungkapkan sebelumnya, *content analysis is most commonly used to assess organisations "social and environmental disclosures is content analysis"* (Milne and Adler, 1999 dalam Vourvachis, 2007)

Pengukuran CSRDI (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*) mengacu pada penelitian Sembiring (2005), yang menggunakan *content analysis* dalam mengukur variety dari CSRDI. *Content analysis* adalah salah satu metode pengukuran CSRDI yang sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Rumus perhitungan CSRDI menurut Haniffa et al (2005) yang diseduaikan adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_j}{n_j}$$

CSRDI_j : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

X_j : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan j

n_j : Total item pengungkapan

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja menurut Fahmi (2012:5) adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat oriented atau non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut Bastian (2006:274) bahwa:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu.

2.1.3.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa:

“Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan (yang) dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan (aktivitasnya) dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”

Menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan di antaranya laporan laba rugi dan neraca.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat - alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

2.1.3.3 Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2009:239), tujuan kinerja keuangan:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan.
Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2010:31), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang.
3. Rentabilitas atau profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban

bunga dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.3.5 Tahapan-tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan pada umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dengan mengevaluasi kecenderungan posisi keuangan sepanjang waktu.

Menurut Fahmi (2012:3), ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
Review ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan perhitungan.
Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil perhitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada 2 yaitu:
 1. *Time series analysis*, yaitu membandingkan antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 2. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
- d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
 Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang di hadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.1.3.6 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Sawir (2001:6) pengukuran kinerja keuangan dinyatakan sebagai berikut:

“Untuk menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan merupakan tolak ukur yaitu rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan antarprestasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan dan prestasi perusahaan. Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar”.

Menurut Hanafi (2005:42) pengukuran kinerja keuangan dinyatakan sebagai berikut:

“Salah satu rasio untuk menilai prestasi perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya”.

Menurut Kasmir (2012:197) pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai: “... alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak”.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat pada analisis laporan keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Menurut Riyadi (2006:155):

“Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu, dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut”.

Menurut Fahmi (2012:15), analisis rasio tersebut di antaranya adalah:

1. Rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pembayaran hutang-hutang jangka pendeknya. Meliputi *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Acid Test Ratio* atau *Quick Ratio*.
2. Rasio leverage, yang digunakan untuk mengukur seberapa dana kebutuhan perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Meliputi *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Time Interest Earned*.
3. Rasio aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi *Inventory Turnover*, *Receivable Turnover*, *Fixed Asset Turnover*, dan *Other Asset Turnover*.
4. Rasio profitabilitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Meliputi *Net Profit Margin* (NPS), *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA), dan *Earning Per Share* (EPS).

2.1.3.7 Profitabilitas

2.1.3.7.1 Pengertian Laba

Wild, Subramanyam, dan Halsey (2010:25) mendefinisikan laba sebagai berikut:

“Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), laba merupakan:

“Jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal, kalau ada) dikurangkan pada

penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih.”

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003: 444).

2.1.3.7.2 Jenis-jenis Laba

Berikut jenis-jenis laba:

1. Laba kotor

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2010:120) laba kotor merupakan “pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan.

2. Laba operasi

Menurut Stice, Stice, dan Skousen (2004:243) yang dialihbahasakan oleh Safrida dan Ahmad, “laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi”. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.

3. Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2010:25) merupakan “laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan”.

4. Laba bersih

Laba bersih menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005:25) merupakan “laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak”.

2.1.3.7.3 Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:196), rasio profitabilitas merupakan:

“Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.”

Sedangkan menurut Purba (2012), profitabilitas merupakan:

“Tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasionalnya. Profitabilitas menggambarkan pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk membiayai investasi. Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor.”

Menurut Harahap (2010:304), menyatakan bahwa:

“Analisa rasio profitabilitas yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber dana yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan jumlah cabang.”

2.1.3.7.4 Metode-metode Profitabilitas

Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan yaitu dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menghubungkan dengan besaran tertentu yaitu penjualan maupun modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Kasmir (2012:200) menyatakan dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. *Net Profit Margin* atau margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan.
2. *Return on Investment (ROI)* atau hasil pengembalian investasi atau return on total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.
3. *Earning per Share (EPS)* atau rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.
4. *Return on Equity (ROE)* atau hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Return on Equity merupakan alat analisis yang lazim digunakan oleh investor dan pemimpin perusahaan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Bagi investor, analisis *Return on Equity* menjadi penting karena dengan analisis tersebut dapat diketahui keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan. Bagi perusahaan, analisis ini menjadi penting karena merupakan faktor penarik bagi investor untuk melakukan investasi.

Pengertian *Return on Equity* menurut Kasmir (2012:204) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sedangkan menurut Irham (2012:98), ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Return on Equity (ROE) merupakan pengembalian atas ekuitas saham biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang saham. Investor memandang bahwa *Return on Equity* (ROE) merupakan indikator profitabilitas yang penting, besar kecilnya *Return on Equity* (ROE) tergantung pada besarnya perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. *Return on Equity* memiliki rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Saham Biasa}} \times 100\%$$

Dengan demikian, rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila *Return on Equity* (ROE) semakin tinggi, maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham; dalam hal ini, akan berdampak pada peningkatan harga saham.

Selain keempat yang dinyatakan oleh Kasmir, Harahap (2010:4) menambahkan sebagai berikut:

1. *Asset Turn Over*
Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.
2. *Return On Assets* (ROA)
Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.
3. *Basic Earning Power* (BEP)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

4. *Contribution Margin*

Rasio ini menunjukkan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini kita dapat mengevaluasi pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba.

2.1.3.8 Solvabilitas

2.1.3.8.1 Pengertian Hutang

Menurut FASB dalam Pithaloka (2009), definisi hutang adalah:

“Pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu”.

Subramanyam dan John J. Wild (2010:169), mengemukakan bahwa:

“Kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban (*liabilities*) merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban pendanaan (*financing liabilities*) merupakan seluruh bentuk pendanaan kredit seperti wesel bayar jangka panjang dan obligasi, pinjaman jangka pendek, dan sewa. Kewajiban operasi (*operating liabilities*) merupakan kewajiban yang timbul dari operasi seperti kreditor perdagangan, kredit yang ditanggguhkan, dan kewajiban pensiun”.

Ghozali dan Chairiri (2007) dalam Pithaloka (2009), menjelaskan bahwa:

“Menurut IAI, kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”.

Baridwan (2004) dalam Wahyu S. A. (2011), mendefinisikan hutang sebagai:

“Pengorbanan manfaat ekonomi yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan memindahkan aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu”.

2.1.3.8.2 Jenis-jenis Hutang

Menurut Djarwanto (2004:34), klasifikasi hutang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Hutang jangka pendek meliputi:

 - a. Hutang dagang (*Accounts payable*) adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.
 - b. Wesel bayar (*Notes payable*) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel).
 - c. Penghasilan yang ditangguhkan (*Deferred revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu menyerahkan uang kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.
 - d. Kewajiban yang masih harus dipenuhi (*Accrual payable*) adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya upah, bunga, sewa, pension, pajak harta milik dan lain-lain).
 - e. Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo (*Maturing long term debt*) adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi utang jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi.
2. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang ialah:

- a. Hutang hipotik (*Mortgage note payable*) adalah surat tanda berutang dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi satu tahun dimana pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu misalnya bangunan, tanah, atau perabot.
- b. Hutang obligasi (*Bonds payable*) adalah surat tanda berutang yang dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar pokok pinjaman pada tanggal jatuh temponta dan membayar bunganya secara teratur pada setiap interval waktu tertentu yang telah disepakati.
- c. Wesel bayar jangka panjang (*Notes payable-long term*) adalah wesel bayar dimana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu satu tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal.

Subramanyam dan Wild (2010:169), menjelaskan bahwa kewajiban umumnya dilaporkan sebagai lancar (*current*) atau tidak lancar (*non current*), biasanya didasarkan pada kapan kewajiban tersebut jatuh tempo, dalam waktu satu tahun atau tidak.

1. Kewajiban Lancar

Kewajiban lancar (atau jangka pendek) merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang antara satu tahun dan satu siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban pada nilai sekarang seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang. Terdapat dua jenis kewajiban lancar. Jenis pertama timbul dari aktivitas operasi, meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka (*unearned revenue*), uang muka, utang usaha, dan beban operasi akrual lainnya, seperti utang gaji. Jenis kedua kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga.

2. Kewajiban Tak Lancar

Kewajiban tak lancar (atau jangka panjang) merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Kewajiban tak lancar beragam bentuknya, dan penilaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh

batasan dan ketentuan. Pengungkapan meliputi tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, fitur penarikan, dan provisi subordinasi. Pengungkapan meliputi pula jaminan, persyaratan penyisihan dana pelunasan, dan provisi kredit berulang. Perusahaan harus mengungkapkan *default* atas provisi kewajiban, termasuk untuk bunga dan pembayaran kembali pokok pinjaman.

2.1.3.8.3 Pengertian Solvabilitas

Rasio *leverage* disebut juga rasio solvabilitas. Rasio leverage atau rasio solvabilitas yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditor perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui.

Harahap (2010:303) menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya/kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:54) rasio leverage atau rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi.

Sedangkan definisi *leverage* menurut Fakhrudin (2008:109) adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari *equity* dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi”.

2.1.3.8.4 Metode-metode Pengukuran Solvabilitas

Terdapat beberapa jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage*. Kasmir (2012:155) mengemukakan bahwa:

“Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain:

1. *Debt to asset ratio (debt ratio)*
2. *Debt to equity ratio*
3. *Long term to equity ratio*
4. *Tangible assets debt coverage*
5. *Current liabilities to net worth*
6. *Times interest earned*
7. *Fixed chared coverage”*

Menurut Fahmi (2012:127), secara umum terdapat tujuh rasio *leverage*, yaitu *Debt to Total Assets* atau *Debt Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Times interest earned*, *Cash flow coverage*, *Long- term debt to total capitalization*, *Fixed charge coverage*, *Cash flow adequacy*.

Ada lima rasio *leverage* yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan menurut Sutrisno (2009: 249-250), yakni sebagai berikut

1. *Debt to Total Asset Ratio*
Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang (*debt ratio*), mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik.
2. *Time Interest Earned Ratio*
Time interest earned ratio yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya.

3. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga angsuran pinjaman, dan sewa.

4. *Debt Service Ratio*

Debt service ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman.

5. *Debt to Equity Ratio*

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya *debt to equity*-nya maksimal 100%.

Menurut Fraser (2010:185), *Debt to Equity Ratio* adalah: “... *measures the riskiness of the firm's capital structure in terms of the relationship between the funds supplied by creditors (debt) and investors (equity)*”.

Debt to Equity Ratio menurut Kasmir (2012:166) adalah: “... rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang”.

Adapun pengertian *debt to equity ratio* menurut Husnan (2006:70) sebagai berikut: “*Debt to equity ratio* menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri”.

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi porsi hutang, semakin besar tingkat risiko karena kreditur harus dilunasi terlebih dahulu daripada pemilik.

Rumus untuk mengukur *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

2.1.4 Nilai Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menurut Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian persediaan.

Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dari pembukuan.

2.1.4.2 Pengertian Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan

meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau para pemegang saham (Brigham dan Houston, 2010:7 yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto).

Pengertian nilai perusahaan menurut Sartono (2010:487) adalah sebagai berikut :

“Nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual di atas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu”.

Menurut Husnan (2006:6), nilai perusahaan adalah: “... harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual”.

Sedangkan menurut Keown dkk (2010:35) yang dialihbahasakan oleh Marcus Prihminto Widodo, nilai perusahaan adalah: “... nilai pasar dari hutang dan ekuitas perusahaan”.

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan tingginya nilai perusahaan maka kemakmuran pemegang saham juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya harga saham, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi juga nilai perusahaan begitu juga sebaliknya.

2.1.4.3 Metode-metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan suatu rasio yang disebut rasio penilaian. Definisi rasio penilaian menurut Sutrisno (2009:224) adalah: “... suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada masyarakat (investor) atau pada para pemegang saham”.

Rasio penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Menurut Wetson dan Copeland (2008:244) yang dialihbahasakan oleh A. Jaka Wasana, rasio penilaian terdiri dari: *Price Earnings Ratio* (PER), *Price to Book Value* (PBV), dan Rasio Tobin's Q.

1. *Price Earnings Ratio* (PER)

Rasio PER mencerminkan banyak pengaruh yang kadang-kadang saling menghilangkan yang membuat penafsirannya menjadi sulit. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi faktor diskonto dan semakin rendah rasio PER. Rasio ini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2. *Price to Book Value* (PBV)

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi PBV berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut.

3. Rasio Tobin's Q

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Menurut Smithers dan Wright (2007:37) dalam Prasetyorini (2013), Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

2.1.4.4 Rasio Tobin's Q

2.1.4.4.1 Pengertian Saham

Menurut Sutrisno (2003:114), saham merupakan: ...surat bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan penghasilan tidak tetap.

Sedangkan menurut Fakhruddin (2008:175), saham merupakan:

“Salah satu sekuritas atau efek atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang bersifat kepemilikan. Artinya siapapun yang membeli saham berarti ikut memiliki berapa persen

bagian dari perusahaan tertentu atau perusahaan yang menerbitkan saham”.

Menurut Husnan dan Pujdiastuti (2006:39), saham merupakan:

“...secarik kertas yang menunjukkan hak pemilik kertas dan tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan berbagi kondisi untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.”

Berdasarkan kedua definisi di atas menunjukkan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau instansi terhadap suatu perusahaan yang menerbitkan saham.

2.1.4.4.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Atmaja (2008:17), jenis-jenis saham terdiri dari:

1. Saham Biasa (*Common Stock*)
Saham biasa adalah sekuritas kepemilikan yang paling populer. Saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Setelah klaim dari kreditur dibayar (berupa pembayaran bunga), manajemen perusahaan dapat menggunakan sisa penghasilan (laba bersih setelah pajak) untuk: (1) membayar dividen kepada pemegang saham, dan (2) menginvestasikan kembali penghasilan tersebut ke dalam perusahaan (menahan laba). Keunikan saham biasa adalah pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Dengan kata lain, kerugian maksimum adalah nilai saham biasa menjadi nol karena seluruh aktiva diambil alih oleh pihak lain. Meskipun kewajibannya terbatas, menginvestasikan uang dengan cara membeli saham biasa dikatakan relatif berisiko karena sifat penghasilan yang diberikan relatif berfluktuatif (tergantung “sisa” penghasilan).
2. Saham Preferen (*Preferred Stock*)
Saham preferen (*preferred stock*) merupakan “blasteran” antara saham biasa dan obligasi. Ia memiliki sifat saham, misalnya tidak ada waktu jatuh tempo (namun ada beberapa saham preferen yang dapat di-call)

dan memberikan dividen. Ia juga memiliki sifat obligasi, yaitu dividen yang diberikan bersifat tetap (merupakan persentase dari nilai nominalnya). Dividen ini mirip konsep bunga obligasi tetap, bedanya adalah kegagalan membayar bunga obligasi dapat menyebabkan kebangkrutan sedangkan kegagalan membayar dividen saham preferen tidak. Jika pada suatu tahun tertentu dividen saham preferen tidak terbayar, ia akan diakumulasikan pada pembayaran dividen tahun mendatang.

2.1.4.4.3 Harga Saham

Seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal yang berupa saham, investor tersebut harus terlebih dahulu mengetahui harga saham dalam menentukan pembelian pada suatu perusahaan. Selambar saham mempunyai nilai atau harga dimana suatu harga saham dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. **Harga Nominal**
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
- b. **Harga Perdana**
Harga perdana merupakan harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwriter*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.
- c. **Harga Pasar**
Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Dan transaksi tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar - benar mewakili harga perusahaan penerbitnya karena pada transaksi di pasar sekunder jarang terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal:

“Harga pasar saham adalah harga suatu saham yang sedang berlangsung dalam suatu pasar modal. Jika bursa tutup maka harga pasarnya adalah terbesar pada saat penutupan (*closing price*)”.

Menurut Halim (2005:20), harga pasar saham adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham.

2.1.4.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Fahmi (2012:276) mengemukakan bahwa, beberapa kondisi dan situasi yang menentukan suatu saham itu mengalami fluktuasi, yaitu:

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi.
2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha), seperti membuka kantor cabang (*brand office*), kantor cabang pembantu (*sub brand office*) baik yang dibuka di domestik maupun di luar negeri.
3. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan.
5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.
6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat.
7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham.

Menurut Harjito (2009:85), naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fundamental perusahaan, sedangkan faktor eksternal sebagian disebabkan oleh informasi yang diperoleh pasar.

2.1.4.4.5 Nilai Buku

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:172), nilai buku memberikan manfaat yang penting dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu:

1. Nilai buku dengan penyesuaian potensial (*potensial adjustment*), seringkali digunakan dalam menaksir untuk keperluan merger.
2. Analisis perusahaan mengkomposisikan *asset liquid* yang utama (*finance, investment, insurance, and banking institution*) berdasarkan nilai buku.
3. Analisis *high bond grade* dari saham preferen memerlukan pertimbangan dalam *asset coverage*.

Sulistiyastuti (2002:1) dalam Lufianti (2011), nilai buku per lembar saham adalah: ...ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar yang berkaitan dengan kepentingan akuntansi dan hukum. Nilai buku per lembar saham (*book value per share*) dihitung berdasarkan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar.

Menurut Lutfianti (2011), nilai buku adalah: ...suatu nilai yang dihasilkan dari penggunaan teknik standar akuntansi yang digunakan dan diperhitungkan laporan keuangan yang tersaji dalam neraca yang disiapkan oleh perusahaan, yang merupakan hasil penggunaan dari teknik akuntansi yang konservatif.

2.1.4.4.6 Rasio Tobin's Q

Menurut Brealey dan Myers (1996:776) dalam Ni Putu Ayu (2012), Tobin's Q dapat didefinisikan sebagai berikut: "...*The ratio of the market value of a company's debt and equity to the current replacement costs of its assets is often called Tobin's Q ratio*". Tobin's Q ratio atau biasa disebut juga dengan q ratio adalah rasio yang ditemukan oleh Dr. James Tobin pada tahun 1967, digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Untuk menghitung Tobin's Q rasio

digunakan rumus yang digunakan menurut White dkk (2002) dalam Agustina (2013) adalah sebagai berikut:

$$TQ = \frac{EMV}{EBV - D}$$

Keterangan:

EMV = *Equity Market Value* (Nilai Pasar Ekuitas)

EBV = *Equity Book Value* (Nilai Buku dari Ekuitas)

D = *Liabilities Book Value* (Nilai Buku dari Total Hutang)

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (*closing price*) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya. Semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini terjadi karena semakin besar nilai pasar perusahaan dibandingkan nilai buku perusahaan, maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).

Tobin's Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa saja. Brealey dan Meyers (2000) dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan Tobin's Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang kuat. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasinalisasinya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh CSR Disclosure terhadap Nilai Perusahaan

Pengungkapan CSR merupakan pemberian informasi dan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap *stakeholder*. Hal ini juga merupakan salah satu cara mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi *stakeholder* (Kartini, 2013:56).

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori signal (*signalling theory*), manajer yang memiliki informasi bagus tentang perusahaan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada investor luar agar saham perusahaan meningkat (Sugiarto, 2009 dalam Agustina, 2013).

Pengungkapan CSR diharapkan akan mampu menaikkan nilai perusahaan. Karena kegiatan CSR merupakan keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akan mampu memilih produk yang baik yang dinilai tidak hanya barangnya saja, tetapi juga melalui tata kelola perusahaannya. Kegiatan CSR sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pada saat masyarakat yang menjadi pelanggan memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan, maka mereka akan loyal terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga hal ini akan mampu menaikkan citra perusahaan yang direfleksikan melalui harga saham yang akan meningkat (Agustina, 2013).

Diharapkan dengan pengungkapan CSR dapat meningkatkan harga saham perusahaan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin banyak pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Bukti empiris penelitian yang mendukung teori tersebut di antaranya Agustina (2013) dan Rimba (2010) mengemukakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Kasmir (2012:196), profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.

Dengan semakin tinggi keuntungan/laba yang dihasilkan perusahaan, ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga saham. Jika harga saham semakin meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat (Susilowati, 2011).

Bukti empiris penelitian yang mendukung teori tersebut di antaranya Agustina (2013) dan Mahendra (2011) mengemukakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Darsono dan Ashari (2005:54), rasio *leverage* atau rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi

Solvabilitas (*leverage*) digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston dan Copeland, 1992 dalam Sukirni, 2012).

Penggunaan hutang yang makin banyak, pada perolehan laba sebelum bunga dan pajak akan menghasilkan laba per saham yang lebih besar. Jika laba per saham meningkat, maka akan berdampak pada meningkatkannya harga saham, dan peningkatan harga saham akan secara linier meningkatkan nilai perusahaan (Susilowati, 2011).

Bukti empiris penelitian yang mendukung teori tersebut di antaranya Sukirni (2012) dan Marius (2014) yang menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H1: CSR *disclosure* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

H3: Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan